

TAJUK RENCANA

Waspada! Kampanye di Medsos

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut setidaknya tujuh indikator kerawanan terjadi di tempat pemungutan suara (TPS). Yakni terkait penggunaan hak pilih, keamanan, potensi ada kegiatan kampanye, netralitas ASN, prajurit TNI/Polri, logistik pemilu, lokasi yang sulit dijangkau atau daerah rawan bencana dan/atau dekat rumah pasangan calon dan terkait keterandalan jaringan listrik/internet (KR 12/2).

Pemetaan tersebut didasarkan pada pengalaman pemilu periode sebelumnya serta berdasar laporan pengawas pemilu di daerah. Hal lain yang tak kalah pentingnya untuk diantisipasi Bawaslu adalah kampanye lewat media sosial (medsos) pada masa tenang sekarang ini. Seperti diakui Ketua Bawaslu DIY M Najib, pihaknya tak bisa mengawasi konten kampanye di medsos sendirian, sehingga harus menggandeng berbagai pihak, antara lain Polda DIY, Kominfo serta lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan, termasuk pers.

Meski memasuki masa tenang, praktiknya tak semua kontestan merasa tenang, mereka berusaha mempengaruhi massa melalui pelbagai cara, antara lain medsos. Kita paham bahwa PKPU telah mengatur tentang kampanye di media mainstream maupun media sosial. Namun yang disebut terakhir ini agaknya tak gampang untuk diawasi. Mengapa ? Boleh jadi para kontestan telah mendaftarkan akun medsos resminya untuk kegiatan kampanye.

Namun, bagaimana dengan akun tak resmi yang dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye ? Akun ‘siluman’ ini justru yang membahayakan, karena

sulit dikontrol dan cenderung liar. Hampir setiap hari kita dengan mudah menemukan akun-akun tak jelas yang isinya menyerang kontestan lain dan informasi-informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Informasi yang demikian justru tersebar secara masif di media sosial. Lantas, siapa yang bertanggung jawab ?

Wajar bila Bawaslu kewalahan untuk melakukan pengawasan kampanye di medsos terutama pada masa tenang ini, sehingga perlu menggandeng institusi lain. Di sinilah peran pers mainstream, termasuk KR, untuk ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, terutama pada masa tenang ini. Pelbagai pelanggaran harus ditindaklanjuti Bawaslu, tak boleh hanya sekedar dilaporkan.

Khusus pengawasan terhadap netralitas aparat TNI/Polri, di sejumlah daerah telah didirikan Posko yang secara khusus menerima pengaduan menyangkut pelanggaran netralitas TNI/Polri. Hanya saja, harapan kita, semua aduan hendaknya ditindaklanjuti sepanjang buktinya cukup. Kita ingin agar transisi kepemimpinan nasional ini berjalan secara demokratis melalui penyelenggaraan Pemilu yang luber dan jurdil. Selain itu, keutuhan bangsa juga tetap terjaga.

Masa tenang ini hendaknya dimanfaatkan masyarakat untuk merenung sebelum menjatuhkan pilihan siapa yang bakal memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Jangan sampai pilihan jatuh pada orang salah yang tidak memperjuangkan nasib rakyat. Masyarakat kini sudah cerdas pada pilihannya masing-masing tanpa dibayangi rasa ketakutan diintimidasi maupun diiming-imingi lembaran rupiah.

HARI Rabu (14/2) besok menjadi Hari ‘Hi’ dilangsungkan pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) tanpa tekanan, tanpa intimidasi. Bisa dipastikan, fokus utama rakyat Indonesia ada pada pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil predisen (cawapres).

Sebagaimana kita ketahui KPU telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) : paslon 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Tentu, besok yang akan menarik perhatian adalah penghitungan cepat (*quick count*). Metode ini telah diakui secara ilmiah sebagai metode yang relatif tepat di dalam memprediksi siapa pemenang pemilihan presiden.

Dasar Hukum

Penghitungan cepat diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terutama pasal 448 dan 449. Dalam pasal 448 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut salah satunya dalam bentuk penghitungan cepat hasil Pemilu. Pasal 449 ayat (3) dijelaskan bahwa Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal (4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu. Sementara pasal (5) berisi pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. KPU juga telah merilis Keputusan No.1035/2023 tentang Pedoman Teknis

Akhmad Fauzy

Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan data dari KPU, total rekap nasional pemilih dalam dan luar negeri dengan 514 kab/kota, 128 negara perwakilan, jumlah kecamatan 7.277, jumlah desa/kelurahan 83.731, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 823.220, jumlah pemilih laki-laki



KR-JOKO SANTOSO

102.218.503 dan perempuan 102.588.719 sehingga total 204.807.222. Paling tidak kurang lebih ada sebanyak 83 lembaga yang mengajukan pendaftaran ke KPU sebagai lembaga survei, jajak pendapat dan hitung cepat hasil pemilu.

Penghitungan cepat biasanya dilakukan dengan cara mengambil sampel sebanyak 3.000 hingga 5.000 TPS. Semakin banyak sampel semakin baik. Pengambilan sampel TPS hendaknya mewakili keragaman basis asal daerah paslon, sebaran basis partai pendukung paslon, keterwakilan geografis dan sebaran tokoh masyarakat pendukung paslon. Lembaga survei yang terdaftar

melakukan penghitungan cepat, menempatkan petugasnya di TPS yang terpilih sebagai sampel. Petugas tersebut menunggu proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Penghitungan suara mulai dilaksanakan pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pemungutan suara. Petugas dari lembaga survei akan melaporkan secara langsung hasil penghitungan suara tersebut melalui aplikasi atau pesan singkat (sms) atau WhatsApp. Lembaga survei akan merekap semua hasil perhitungan dari TPS sampel.

Tiga Waktu

Indonesia terbagi dalam 3 waktu, yaitu Waktu Indonesia bagian Timur (WIT), bagian Tengah (WITA) dan bagian Barat (WIB). Masing-masing bagian selisih 1 jam dimana WIT terlebih dahulu. Dengan demikian pemungutan suara yang jadi patokan adalah WIB.

Hasil penghitungan cepat ini setidaknya akan dapat menjawab berapa persen prediksi perolehan suara masing-masing paslon 01, 02 dan 03. Penghitungan cepat tersebut juga dapat menjawab apakah pemilu kali ini satu putaran atau 2 putaran. Syarat 1 putaran berdasarkan pasal 416 UU Pemilu adalah paslon terpilih harus memperoleh suara lebih dari 50% dari total suara dengan minimal 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. □-d

**) Prof Dr Akhmad Fauzy, Guru Besar Statistika UII Yogyakarta*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Penggunaan kata ‘Graha’ dan ‘Grha’

KITA acap kali membaca termasuk dalam media surat kabar tentang penggunaan kata yang tidak tepat. Beberapa waktu lalu, beberapa media termasuk media ini fi bahkan media nasional — juga menuliskan judul ‘Presiden Joko Widodo meresmikan gedung Graha Utama AMN Magelang’.

Kata ini sangat tidak tepat, salah!. Karena menurut Kamus Bahasa Jawa Kuno karya Zoetmulder dan SO Robson,

makna kata *Graha* adalah roh jahat buaya, ular atau iblis. Sedang kalau yang dimaksud bangunan, gedung, ejaan menuliskannya adalah *Grha*, sebagaimana nama Balaiung UGM, Grha Sabha Pramana.

Terimakasih, semoga ini menjadi perhatian. Bukan hanya jurnalis ataupun editor media, namun juga pemilik gedung kala akan memberi nama.

**) FS Hartono, Purwosari 004/059 Sinduadi Sleman*

Menunggu Munculnya TPS Kreatif

BESUK Rabu (14/2) merupakan hari pencoblosan, pemilihan umum. Saya senang, dalam pemilu-pemilu lalu masyarakat menyambut dengan antusias lewat wujud TPS kreatif dan unik. Ini benar-benar menghibur setelah berbulan-bulan kita seakan ‘diteror’ sampah visual bernama balihoo, poster, spanduk dan iklan pemilu luar ruang lainnya, yang hanya menampilkan wajah-wajah yang tidak kenal sepenuhnya. Kreativitas yang menarik di pel-

bagai kota. Ini menunjukkan, masyarakat kita sejatinya guyub rukun, bersadukan dan yang diinginkan adalah Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan. Petugas TPS dengan ikhlas bersama masyarakat setempat menghadirkan keunikan dan kreativitasnya yang layak diapresiasi. Mungkin pemkot/pemkab setempat perlu memberikan penilaian dan apresiasi. □-d

**) Kurnia MSc, Banyumanik Semarang*

PENDIDIKAN merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sehingga pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebudayaan adalah buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap zaman dan alam. Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan sebagai budaya yang diwariskan secara lintasgenerasi.

Ki Hadjar menyebutkan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan ‘sifat’ dan ‘bentuk’ lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan ‘isi’ dan ‘irama’. Ki Hadjar hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan Abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur.

Berinovasi

Seorang pendidik harus mampu berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman sehingga mampu memfasilitasi siswa untuk belajar secara bermakna dan berorientasi pada masa depan. Ki Hadjar juga mengingatkan para pendidik untuk tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Berarti, pendidik boleh mengintegrasikan berbagai hal dalam pembelajaran. Namun pengaruh dari luar

Biya Ebi Praheto

tetap harus disaring dengan mengutamakan kearifan lokal dan kondisi sosial budaya Indonesia. Isi dan irama dalam kodrat zaman yang dimaksud adalah muatan pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia atau tetap harus memperhatikan kekuatan sosio kultural peserta didik.

Ki Hadjar menegaskan, pendidik harus mendidik anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Dengan demikian cara belajar anak di zaman sekarang berbeda dengan cara belajar anak di masa yang lalu. Anak di masa sekarang sudah sangat dekat dengan teknologi bahkan tidak dapat lepas dari gadget. Karenanya, pendidik dituntut mampu menyelami dunia anak dan berinovasi. Salah satu bentuk inovasi tersebut dengan mengintegrasikan budaya berbasis *augmented reality* dalam pembelajaran (Mendoza-Ramírez, 2023). Salah satu bentuk *augmented reality* yang telah dikembangkan yaitu aplikasi *Tandola* (Taman Dolanan). Istilah *dolanan* atau permainan mengkomodasi kecenderungan dunia anak yang masih senang bermain. *Dolanan* juga diasumsikan sebagai kegiatan yang menyenangkan.

Permainan Tradisional

Aplikasi *augmented reality* merupakan aplikasi permainan tradisional untuk melatih keterampilan motorik anak. Pengembangan aplikasi ini mengintegrasikan lima azas yang dikemukakan oleh Ki Hadjar yang dikenal dengan sebutan Pancadharmas, yaitu: kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Aplikasi ini berisi permainan tradisional ini dilengkapi panduan hingga manfaat dari permainan tradisional dan mengimplementasikan *Tri-N (Niteni, Nirokake, Nambahi)*.

Penggabungan tersebut mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Harapan besar untuk pendidik di setiap jenjang dapat berinovasi sesuai perkembangan zaman melalui pengembangan media, metode, model, dan perangkat pembelajaran dengan memperhatikan aspek sosial budaya peserta didiknya. Hal itu untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, berorientasi pada masa depan. Serta sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Utamanya untuk abad ke-21 dengan penciri mampu berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. □-d

**) Biya Ebi Praheto, Ketua Program Studi dan Dosen Prodi PGSD, FKIP, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Naskah Kerja Sama UST - Kedaulatan Rakyat*

Pojok KR

Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan di TPS.
-- Antisipasi tak boleh terlambat. ***
Harga beras melambung tinggi di atas HET.
-- Telusuri lagi tata niaganya. ***
Banjir di Demak, TPS dipindah ke pengungsian.
-- Salah satu kerawanan yang disebut Bawaslu.

Berabe

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Drs H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.